

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Tahun 2022 telah selesai disusun dengan baik. Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram merupakan dokumen berisi kegiatan-kegiatan dan target yang dilakukan dalam penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan Visi dan Misi BNN, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam pelaksanaan program P4GN, guna tercapainya sasaran, target dan indikator kinerja BNN Kota Mataram.

Kepala BNN Kota Mataram



Ivanto Aritonang, ST

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. KONDISI UMUM**

#### 1. Permasalahan

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram hingga kini masih dihadapkan dengan kendala Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, perubahan program prioritas nasional yang perlu penyesuaian pelaksanaannya dan kebijakan-kebijakan organisasi yang terus berubah. Berbagai permasalahan yang menjadi kendala dan hambatan ini tentunya akan sangat mempengaruhi hasil pelaksanaan tugas BNN Kota Mataram.

#### 2. Hasil Evaluasi

Dengan segala keterbatasan tersebut, Badan Narkotika Nasional Kota Mataram terus berupaya mengelola dengan secara cermat sehingga dapat melaksanakan tugas maupun pelayanan untuk publik dengan baik dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Melalui peningkatan kerjasama dengan stakeholder lingkup Kota Mataram serta mengkolaborasikan beberapa program di wilayah pemerintah Kota Mataram untuk mendukung pelaksanaan P4GN, kekuatan kolaborasi ini yang akan menjadi strategi pelaksanaan program P4GN di wilayah Kota Mataram dengan berbagai permasalahan yang ada.

### **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

**BAB II**

**RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**

**BNN KOTA MATARAM**

**TAHUN 2022**

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram menetapkan rencana kinerja Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2022. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Mataram sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Kota Mataram bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Mataram Tahun 2022 sebagai berikut.

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KEBUTUHAN PENDANAAN</b>
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	<b>51</b>	<b>Rp. 68.000.000</b>
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba	<b>78,80</b>	<b>Rp. 106.000.000</b>
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipan	<b>3,20</b>	<b>Rp. 221.400.000</b>
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-	-
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional	<b>1</b>	<b>Rp. 10.300.000</b>
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	<b>0</b>	<b>Hanya Target di BNNP</b>
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	<b>0</b>	<b>Hanya Target di BNNP</b>
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	<b>1</b>	<b>Rp. 197.035.000</b>
		Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	<b>3,20</b>	<b>-</b>
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	<b>-</b>	<b>-</b>
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	<b>-</b>	<b>-</b>
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	<b>-</b>	<b>-</b>
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	<b>-</b>	<b>-</b>
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak	<b>-</b>	<b>-</b>

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	Tindak Pidana Narkotika	pidana narkotika dan prekursor narkotika	pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)		
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	<b>91</b>	<b>Rp. 8.800.000</b>
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	-
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	<b>95</b>	<b>Rp. 93.759.000</b>
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	-

\*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi / Kabupaten/Kota

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Kota Mataram Tahun 2022 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kota Mataram tahun 2022. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kota Mataram selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran di BNN Kota Mataram, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

**Lampiran**  
**Matrik Rencana Volume Rincian Output**  
**Badan Narkotika Nasional Kota Mataram**  
**Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT</b>	<b>RENCANA VOLUME</b>
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	-
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10 Orang
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	3 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Indeks Kemandirian Partisipasi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	-
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	-

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT</b>	<b>RENCANA VOLUME</b>
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional	Standar Profesi dan SDM	5
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	Target BNNP
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	Target BNNP
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	100 Orang
			Layanan IBM	10 Orang
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	200 Orang
			Unit IBM yang terbentuk	1 Unit
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	-
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	-

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT</b>	<b>RENCANA VOLUME</b>
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	-
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	-
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
		2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Perkantoran	12 Bulan